

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir - akhir ini topik mengenai *Corporate Governance* menjadi isu yang sangat menarik setelah terjadinya krisis multidimensi di beberapa Negara Asia. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami krisis multidimensi tersebut yaitu terjadi pada pertengahan tahun 1997. Krisis multidimensi ini diawali dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Berbagai pihak mengklaim bahwa penyebab terjadinya krisis multidimensi ini adalah lemahnya pengelolaan yang ada dalam perusahaan. Banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap prinsip – prinsip *corporate governance*. Adanya skandal Enron dan munculnya Sarbanes Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 di Amerika Serikat serta kasus – kasus yang ada di Indonesia seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005) merupakan akibat karena tidak patuh terhadap prinsip – prinsip *corporate governance*. Sejalan dengan itu adanya keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL//2006 tentang kewajiban bagi emiten atau perusahaan publik untuk mencantumkan uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* yang akan maupun yang telah dilaksanakan.

Tahun 2007 *Asian Corporate Governance Association*, CLSA Asia – Pacific *Markets* menempatkan Indonesia pada posisi terbawah (urutan kesebelas) di Asia, hal ini membuktikan bahwa rendahnya transparansi perusahaan-perusahaan di lingkungan bisnis Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa *corporate governance* sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomis suatu perusahaan yang meliputi hubungan antara manajemen, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Selain itu *corporate governance* juga memberikan strategi - strategi bagi perusahaan dalam mencapai sasaran dan tujuan perusahaan.

Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang baik akan membantu perusahaan dalam menciptakan hubungan yang baik diantara pihak - pihak yang ada di dalam perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi dan pemegang saham), sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Dewan komisaris bertugas untuk memastikan bahwa manajemen telah bekerja untuk kepentingan para pemegang saham yaitu bertanggung jawab untuk menjamin kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, sehingga nantinya akan tercipta sistem pengawasan yang baik dan *corporate governance* dapat terlaksana dengan baik pula (Nasution dan Setiawan, 2007).

Perusahaan memahami dan menerapkan *corporate governance* berawal dari adanya masalah keagenan keagenan. Masalah keagenan terjadi karena adanya hubungan manajemen (*agent*) dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham (*principal*) atau yang disebut dengan hubungan keagenan. Teori keagenan

menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) dan mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Martiana, 2011). Adanya pemisahan kepemilikan antara manajemen dan pemilik perusahaan akan menimbulkan konflik kepentingan dan asimetri informasi. Konflik kepentingan dan asimetri informasi yang tinggi akan membuat manajemen melakukan kegiatan sesuai dengan keinginannya yang bisa menguntungkan manajemen (sifat oportunistik) tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham. Hal ini menyebabkan pemilik perusahaan membuat mekanisme yang nantinya bisa membatasi perilaku manajemen, sehingga manajemen tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham.

Besarnya tingkat masalah keagenan setiap perusahaan berbeda dengan perusahaan yang lain, tergantung pada manajer dengan mengabaikan maksimalisasi nilai, kompleksitas lingkungan operasi perusahaan, daya tarik *perquisites* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Putra, 2011). Adanya tingkat masalah keagenan yang berbeda antar perusahaan, maka struktur *governance* yang digunakan untuk mengatasi keagenan tersebut juga cenderung berbeda-beda.

Menurut Darmawati, dkk (2005) dalam Sabrina (2010) *corporate governance* mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kinerja perusahaan. Beberapa perusahaan yang telah sukses melaksanakan *corporate governance* merasa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Seperti perusahaan Unilever berhasil menjadi perusahaan yang dipercaya para *stakeholder*, memiliki karyawan yang sangat

professional, kinerja keuangan yang cukup cemerlang dan stabilitas harga saham yang cukup memuaskan (Swasembada, 2005 dalam Sayidah, 2007). Selain itu masih ada Bumiputera yang mampu meningkatkan penjualan di atas pasar, meningkatkan profit, mampu mempermudah *relationship* dan bisa menjaga kepercayaan *stakeholder* (Sayidah, 2007). Penelitian tentang *corporate governance* dan kinerja perusahaan banyak membuktikan bahwa investor memiliki preferensi untuk menghindari perusahaan dengan *corporate governance* yang buruk (McKinsey dan Co, 2002 dalam Sayidah, 2007).

Berbagai penelitian telah menguji hubungan antara berbagai aspek *governance* atas kinerja perusahaan seperti penelitian di Indonesia oleh Theresia (2005), Hamongan dan Mas'ud (2006) dan Putra (2011). Sedangkan penelitian terkait diatas diluar negeri telah dilakukan oleh Teoh dan Wong (1993), Vafeas (2000), Felo, Krishnamurthy, dan Solieri(2003), Bushman et al (2004) dalam Aisysha Dey (2008). Namun, sedikit bukti yang menguji faktor-faktor endogen yang menentukan efektivitas mekanisme tersebut (Aisysha Dey, 2008).

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan hanya berfokus pada mekanisme *governance* individu atau membentuk satu dimensi metrik *governance* dengan menjumlahkan variabel individunya. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada beberapa variabel yang terpisah, sehingga tidak tepat untuk mengukur struktur *corporate governance* suatu perusahaan dan akibatnya menghasilkan kesalahan pengukuran (Larcker, Richardson, dan Tuna, 2007). Beberapa variabel *governance* individu tersebut

sebenarnya saling terkait, sehingga nantinya akan membuat korelasi antar variabel tersebut terabaikan dan menghasilkan kesimpulan yang tidak benar (Agrawal dan Knoeber, 1996, Bowen, Rajgopal, dan Venkatachalam, 2005 dalam Aishesha Dey, 2008).

Penelitian dengan menggunakan agregasi variabel individual *governance* telah dilakukan oleh Aishesha Dey (2008) untuk menurunkan dimensi struktur *corporate governance*. Aishesha Dey melakukan pengujian terhadap 22 variabel *governance* individu dan mendapatkan tujuh faktor *governance* berbeda yang menggambarkan komposisi dan fungsi dewan direksi, kompensasi eksekutif, kompensasi direksi berbasis ekuitas, independensi auditor, struktur dan fungsi komite audit, dan kontrol dewan atas kualitas pelaporan keuangan sebagai representasi dimensi *governance*. Metode ini digunakan juga oleh Larcker, Richardson, dan Tuna, 2007 (LRT) untuk mengukur *governance* tetapi LRT memakai 39 indikator *governance* individu dan membentuk 14 faktor *governance*. Penelitian di Indonesia telah dilakukan oleh Martiana (2011) dan Putra (2011).

Adanya hasil empiris terdahulu yang masih bervariasi dan di Indonesia penelitian ini masih jarang dilakukan. Pada penelitian ini menggunakan variabel masalah keagenan (*agency problem*) yang pada penelitian sebelumnya merupakan istilah/atau nama dari konflik keagenan (*agency conflict*). Nama atau istilah konflik keagenan (*agency conflict*) dengan masalah keagenan (*agency problem*) adalah merupakan hal yang sama. Penelitian ini akan melanjutkan relevansi bukti tentang dampak masalah

keagenan terhadap *corporate governance* dan kinerja perusahaan. Penelitian ini juga akan melakukan perbaikan pengukuran terhadap variabel *corporate governance*, biasanya pada penelitian terdahulu struktur *governance* diukur dengan menguji variabel – variabel *governance* secara terpisah yang nantinya bisa mengakibatkan kesalahan pengukuran karena antar variabel tersebut saling terkait. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Masalah Keagenan terhadap Corporate Governance dan Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan”**. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan Putra (2011). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah menambah periode penelitian menjadi selama 10 tahun mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 dan metode analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Modelling* (SEM).

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini meliputi variabel masalah keagenan terdiri dari enam faktor yang meliputi ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, risiko perusahaan, *leverage*, struktur kepemilikan dan *free cash flow*. Sedangkan variabel *corporate governance* terdiri dari proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, turnover direksi, komite audit, jumlah komite audit, dan kualitas audit.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat diuji dalam

penelitian ini adalah:

1. Apakah masalah keagenan berpengaruh positif terhadap *corporate governance*?
2. Apakah *corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah pengaruh masalah keagenan terhadap *corporate governance* bervariasi antar perusahaan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji apakah masalah keagenan berpengaruh positif terhadap *corporate governance*.
2. Untuk menguji apakah *corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk menguji apakah pengaruh masalah keagenan terhadap *corporate governance* bervariasi antar perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian –

penelitian selanjutnya sehingga bisa memperbaiki penelitian terdahulu.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan informasi mengenai pengukuran perusahaan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaannya.